

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP
LUAS PENGUNGKAPAN INFORMASI
STRATEGIS
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di BEI)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

SINUNG PRIMASTUTI
NIM. 12030110151116

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Sinung Primastuti

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110151116

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN
TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN
INFORMASI STRATEGIS**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt

Semarang, 9 Agustus 2012

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt)
NIP. 19550418 198603 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Sinung Primastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110151116
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN
TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN
INFORMASI STRATEGIS**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 Agustus 2012

Tim Penguji

1. Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt (.....)
2. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt (.....)
3. Puji Harto, S.E., M.Si., Ph. D, Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sinung Primastuti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN INFORMASI STRATEGIS”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau bentuk pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan /atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 9 Agustus 2012
Yang membuat pernyataan,

(Sinung Primastuti)
NIM : 12030110151116

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

The way to be ahead is getting started now. If you start now, next year you will know a lot of things are unknown right now, and you will not know the future if you are waiting

(William Feather)

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan,
Jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan,
tapi lihatlah sekitar dengan penuh kesadaran.

(James Thurber)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Papa dan Mamaku Tercinta
Kakakku Tersayang*

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of corporate governance and firm characteristics on the level of strategic information disclosure. Elements of corporate governance that are used to test the level of strategic information disclosure consist of managerial ownership, institutional ownership, the number of commissioners, the proportion of independent commissioners, and the number of board meetings. Then, for the characteristics of firms using firm size, leverage, and profitability.

Retrieval of data in this study using purposive sampling method in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the year 2009-2010. The samples of this study as many as 128 companies, and for the items strategic information disclosure take from research of Sanchez, Dominguez, and Alvarez (2010) which is about 8 items. The data of this study were tested using multiple regression analysis.

The results show that managerial ownership, the proportion of independent commissioners, company size and profitability are significant and positive effect to strategic information disclosure. While institutional ownership and leverage significant and negative effect, then the number of commissioners and the number of board meetings did not effect to strategic information disclosure.

Keywords : *Corporate Governance, Firm Characteristics, Strategic Information Disclosure, Manufacturing Companies*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan informasi strategis. Elemen-elemen *corporate governance* yang digunakan untuk menguji luas pengungkapan informasi strategis adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris. Lalu, untuk karakteristik perusahaan menggunakan ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas.

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2010. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 128 perusahaan, dan untuk item pengungkapan informasi strategis mengambil dari penelitian Sanchez, Dominguez, dan Alvarez (2010) yaitu sebanyak 8 item. Data penelitian diuji menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengungkapan informasi strategis. Sedangkan kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh signifikan dan negatif, lalu jumlah dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi strategis.

Kata Kunci: *Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan, Pengungkapan Informasi Strategis, Perusahaan Manufaktur

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN INFORMASI STRATEGIS”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah, SWT yang telah memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada penulis.
2. Bapak dan Ibu (Orang Tua) tercinta, yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungannya kepada penulis, juga terima kasih untuk kakakku tersayang, Agung Priaryanto Utomo atas do'a dan semangatnya.
3. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Mohamad Syafrudin.,Msi.,Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Semarang.

5. Bapak Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, saran, dan bimbingan kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Shiddiq Nur Rahardjo, SE, M.Si.,Akt selaku Dosen Wali.
7. Para Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Keluargaku di Semarang (Eyang Harni, Om Tommy, Tante wiedz, Om Manto, Tante Iyum, dan Dito) yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada penulis.
9. Teman satu bimbingan ku yang selalu kompak, Along.
10. Gokil's Family (sahabat sekaligus keluargaku) : Emon, Along, Mumun, Imar, Saras, Dini, Mas Betha, Pram, Eko, Adi, Rendy, dan Mbek yang selalu memberikan keceriaan, saat susah dan senang.
11. Afiet Mardiansyah, terima kasih buat do'a, dukungan, semangat, dan kesabarannya.
12. Teman-teman Akuntansi Reg II 2010 terima kasih atas kekerabatannya selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Semarang, 9 Agustus 2012

Penulis

Sinung Primastuti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	15

2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	15
2.1.2 Teori Efek Pengawasan (<i>Monitoring Effect Theory</i>).....	16
2.1.3 Teori Sinyal (<i>Signalling Theory</i>).....	18
2.1.4 Pengungkapan Informasi	18
2.1.5 Pengungkapan Informasi Strategis	19
2.1.6 <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan Informasi	
Strategis	20
2.1.6.1 Kepemilikan Manajerial	22
2.1.6.2 Kepemilikan Institusional	23
2.1.6.3 Jumlah Dewan Komisaris.....	23
2.1.6.4 Proporsi Komisaris Independen	24
2.1.6.5 Jumlah Rapat Dewan Komisaris	25
2.1.7 Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Informasi	
Strategis	26
2.1.7.1 Ukuran Perusahaan.....	26
2.1.7.2 <i>Leverage</i>	27
2.1.7.3 Profitabilitas	28
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
2.4 Hipotesis	34
2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Luas	
Pengungkapan Informasi Strategis	34

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis	34
2.4.3 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis	35
2.4.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis	36
2.4.5 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis	37
2.4.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis.....	38
2.4.7 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis	39
2.4.8 Pengaruh Profitabilitas terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	42
3.1.1 Variabel Dependen	42
3.1.2 Variabel Independen.....	43
3.1.2.1 Kepemilikan Manajerial	43
3.1.2.2 Kepemilikan Institusional	43
3.1.2.3 Jumlah Dewan Komisaris.....	44
3.1.2.4 Proporsi Komisaris Independen	44
3.1.2.5 Jumlah Rapat Dewan Komisaris	44

3.1.2.6	Ukuran perusahaan	45
3.1.2.7	<i>Leverage</i>	45
3.1.2.8	Profitabilitas	45
3.2	Populasi dan Sampel	47
3.3	Jenis dan Sumber Data	47
3.4	Metode Pengumpulan Data	48
3.5	Metode Analisis	48
3.5.1	Statistik Deskriptif	48
3.5.2	Analisis Regresi Berganda	49
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	50
3.5.3.1	Uji Normalitas	50
3.5.3.2	Uji Multikolinearitas	51
3.5.3.3	Uji Heteroskedastisitas	51
3.5.3.4	Uji Autokorelasi	52
3.5.4	Uji Hipotesis	53
3.5.4.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	53
3.5.4.2	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	53
3.5.4.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54
3.5.5	Uji Beda T – Test	54
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS	56
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	56
4.2	Analisis Data	58

4.2.1 Statistik Deskriptif.....	58
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	61
4.2.2.1 Uji Normalitas	62
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas	64
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	65
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	67
4.2.3 Analisis Regresi Berganda	68
4.2.4 Uji Hipotesis.....	69
4.2.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	69
4.2.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	70
4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	71
4.2.4.4 Hasil Pengujian Hipotesis	72
4.2.5 Uji Beda T – Test	76
4.3 Pembahasan Hasil	77
4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis	77
4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis	78
4.3.3 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis	79
4.3.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis	80

4.3.5 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis	81
4.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis.....	82
4.3.7 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis.....	83
4.3.8 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis.....	84
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Simpulan	85
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	86
5.3 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN – LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel	46
Tabel 4.1 Proses Perolehan Sampel Penelitian	56
Tabel 4.2 Distribusi sampel berdasarkan sektor industri	57
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	58
Tabel 4.4 Uji Normalitas : Kolmogorov Smirnov	64
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas	65
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas : Uji Glejser	66
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi : Durbin Watson	67
Tabel 4.8 Analisis Regresi Berganda	68
Tabel 4.9 Uji Statistik F	69
Tabel 4.10 Uji Statistik t	70
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi.....	71
Tabel 4.12 Ringkasan Hipotesis Penelitian.....	76
Tabel 4.13 Uji Beda Data Pengungkapan Informasi Strategis Panelis 1 dan Panelis 2	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Uji Normalitas : Grafik Histogram.....	62
Gambar 4.2 Uji Normalitas : Grafik <i>Normal P-P Plot</i>	63
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas : Scatterplot	66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Daftar Nama Perusahaan Sampel.....	92
LAMPIRAN B Output SPSS.....	97
LAMPIRAN C Output Uji Beda Pengungkapan Informasi Strategis Panelis 1 (Sinung) dan Panelis 2 (Ala').....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Semua perusahaan setiap tahunnya akan membuat laporan keuangan untuk melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan tersebut menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama satu periode yang lalu. Semakin ketatnya persaingan, perusahaan semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya, salah satunya dengan banyaknya informasi yang diungkapkan pada laporan tahunan mereka. Laporan tahunan merupakan media bagi manajer untuk mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Oleh karena itu, laporan tersebut dapat digunakan para pemegang saham, *stakeholders* dan pihak-pihak lainnya untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan.

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu: pengungkapan wajib (*mandatory disclosures*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosures*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan / BAPEPAM dan LK telah mengatur bentuk dan isi laporan tahunan yang wajib diungkapkan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-134/BL/2006 peraturan X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan - perusahaan publik), sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan

yang melebihi dari yang diharuskan oleh peraturan. Dalam konteks ini, manajemen perusahaan bebas memilih untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dianggap relevan dan mendukung dalam pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Mekk, Roberts, dan Gray, 1995) dalam (Mujiyono, 2004). Luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan setiap perusahaan berbeda tergantung pada kebutuhan maupun kondisi perusahaan, dan informasi strategis perusahaan dapat dituangkan dalam pengungkapan sukarela maupun pengungkapan yang bersifat wajib.

Pengungkapan sukarela dari informasi strategis secara bertahap lebih pada praktek umum perusahaan, karena bermanfaat sebagai petunjuk, seperti kemampuannya untuk membuat suatu perusahaan lebih unggul dari perusahaan lain (Santema et al, 2005) dan kegunaannya dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh investor-investor profesional, bank, analis dan perantara keuangan (Higgings dan Diffenbach, 1985 dalam Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010). Sedangkan pengungkapan sendiri merupakan salah satu prinsip dalam sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*), yaitu transparansi. Baik pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela merupakan cara untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Masalah *corporate governance* menjadi menarik perhatian karena terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara Asia termasuk Indonesia tahun 1997 dan 1998, yang berkembang menjadi krisis multi dimensi berkepanjangan (Kartika, I., 2009). Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB)

menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris; ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidak memadainya pengawasan oleh para kreditor (Kaihatu, 2006).

Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan *corporate governance* akan memberikan lebih banyak informasi dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, semakin baik pelaksanaan *corporate governance* oleh suatu perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap. Demikian juga sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang memberikan pengungkapan yang tinggi dalam laporan tahunan akan menunjukkan bahwa implementasi *corporate governance* pada perusahaan tersebut semakin baik (Khomsiyah, 2003).

Sistem tata kelola di perusahaan-perusahaan Indonesia menganut sistem *two tier*, dimana dalam susunan dewan terdapat Dewan Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*). Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam kerangka tata kelola perusahaan, karena Dewan Direksi sebagai pihak eksekutif bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kinerja Dewan Direksi dan kebijakan yang dibuatnya (Ratnasari, 2011).

Negara yang menganut sistem one tier yaitu negara-negara di Eropa salah satunya Spanyol. Dalam sistem ini, hanya terdapat satu dewan (*board*) yang terdiri dari direktur eksekutif dan non-eksekutif. Pada sistem ini, tidak ada perbedaan posisi pada direktur yang duduk dalam komite pengendalian manajemen dan direktur lain (Ghezzi and Malberti, 2008) dalam (Linoputri, 2010).

Di Indonesia penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap luas pengungkapan informasi diantaranya dilakukan oleh Khomsiyah (2003) yang didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara implementasi *corporate governance* dengan tingkat pengungkapan informasi. Ukuran perusahaan dan regulasi secara positif berhubungan dengan indeks *corporate governance* dan pengungkapan informasi. Struktur kepemilikan masyarakat, komposisi komisaris independen, dan keberadaan komite audit mempunyai hubungan yang signifikan dengan indeks *corporate governance* dan pengungkapan informasi.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mintara (2008), didapatkan hasil *corporate governance* dan regulasi saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan tahunan. Kemudian, untuk ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan.

Kedua penelitian tersebut diatas tidak memisahkan item pengungkapan wajib dan sukarela. Selain itu, terdapat penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap luas pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*) yang

dilakukan oleh Prayogi (2003), hasilnya menunjukkan bahwa likuiditas, basis perusahaan, ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan saham, dan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Kemudian, penelitian Saputri (2010) menunjukkan hasil kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit tidak berhubungan dengan luas pengungkapan sukarela.

Menurut teori agensi, terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dalam suatu perusahaan yang dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya *agency cost*. Biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal merupakan *agency cost* (Saputri, 2010).

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa perilaku *moral hazard* dan asimetri informasi dapat dicegah melalui perjanjian dengan memberikan insentif berupa kompensasi keuangan yang diperhitungkan sebagai *agency cost*, sehingga manajer akan termotivasi untuk menyediakan pengungkapan sukarela untuk mengurangi *agency cost*. Ada beberapa alternatif untuk mengurangi *agency cost*, diantaranya dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional (Haruman, 2008).

Menurut Hongxia dan Qi (2008) dalam Saputri (2010) perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang tinggi. Kepemilikan manajerial merupakan besarnya kepemilikan

saham perusahaan oleh dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam kepemilikan manajerial berarti manajer selain mempunyai tugas menjalankan operasional perusahaan, tetapi juga sebagai pemegang saham, maka akan menyelaraskan kepentingannya. Hal ini konsisten dengan penelitian Nasir dan Abdullah (2005) yang menyatakan kepemilikan manajemen berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan dalam penelitian Rouf dan Al-Harun (2011) menyatakan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan pengungkapan sukarela informasi, yang berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial maka menyebabkan rendahnya pengungkapan sukarela.

Kepemilikan yang lain yaitu kepemilikan institusional, yang merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi keuangan lainnya. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Dalam hal ini pihak manajemen diwajibkan untuk melakukan pengungkapan informasi seluas-luasnya agar dapat mempertahankan Investor institusional (Sari, Anugerah, dan Dwiningsih, 2010). Asumsi ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rouf dan Al-Harun (2011), yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Sedangkan pada penelitian Saputri (2010) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan institusional tidak berhubungan dengan luas pengungkapan sukarela.

Dalam sistem tata kelola perusahaan, peran dewan komisaris sangat penting, yaitu sebagai pengawas kinerja dewan direksi dan kebijakan yang dibuat dewan direksi. Untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial (Ratnasari, 2010). Dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris tidak berhubungan dengan *sustainability disclosure*. Sedangkan dalam penelitian Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, (2010) menunjukkan bahwa *board size* berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi strategis.

Dalam *dual board system*, *stakeholders* bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tentang informasi strategis atau hal lain dari *boards* secara langsung dan terkadang bekerja sama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebutuhan untuk pengungkapan strategi akan lebih kecil di negara dengan *dual board system*, daripada sistem tata kelolanya dengan *unitary board system* (Santema, et al, 2005).

Keberadaan Dewan Komisaris belum memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip *Corporate Governance*, khususnya mengenai perlindungan terhadap investor. Untuk mendorong implementasi *Good Corporate Governance*, dibuatlah sebuah organ tambahan dalam struktur perseroan. Organ-organ tambahan tersebut salah satunya adalah Dewan Komisaris Independen. Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap

segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena Komisaris Independen tidak terpengaruh oleh manajemen, maka mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya (Ratnasari, 2011).

Penelitian Nasir dan Abdullah (2005), menunjukkan adanya hubungan signifikan dan positif antara *Board Independence* dengan tingkat pengungkapan sukarela. Sedangkan dalam penelitian Mintara (2008), dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan tahunan.

Boards of Directors yang paling aktif biasanya dikenal yang paling sering bertemu, menjalankan tugas mereka sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Conger et al., 1998) dalam (Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010), karena mereka mencurahkan lebih banyak waktu untuk konsultasi, mengimplementasikan strategi perusahaan dan pemantauan manajemen tingkat atas (Reyes-Recio, 2000) dalam (Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010). Oleh karena itu, semakin sering frekuensi *meeting* dewan komisaris akan meningkatkan komunikasi diantara mereka dan menjadikan dewan lebih efektif dalam tugas pengawasannya, yang kemudian mengakibatkan semakin luas pengungkapan sukarela informasi perusahaan. Hal ini tidak konsisten pada hasil penelitian Ratnasari (2011) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability report*.

Beberapa penelitian empiris terdahulu menunjukkan keanekaragaman hasil tentang hubungan antara karakteristik perusahaan dengan kelengkapan

pengungkapan sukarela informasi dalam laporan tahunan. Karakteristik perusahaan tersebut diproksikan dengan ukuran perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas.

Ahmed dan Nicholls (1994) dalam Hossain dan Hammami (2009) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan besar akan memiliki sumber daya dan keahlian yang berpengalaman yang diperlukan untuk produksi dan publikasi laporan keuangan dan, oleh karena itu, menunjukkan kepatuhan pengungkapan yang lebih dan tingkat pengungkapan yang lebih besar. Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hadi, Nor dan Sabeni, 2002). (Mujiyono, 2004). (Amalia, 2005) yang menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela, sedangkan dalam hasil penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

Rasio *leverage* penting untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi semua hutang-hutangnya. Perusahaan yang mempunyai proporsi utang lebih banyak dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi krediturnya (Suripto, 1999) dalam (Saputri, 2010). Hal ini sesuai dengan penelitian Sanchez, Dominguez, dan Alvarez (2010) yang menyatakan *leverage* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi strategis, yang berarti perusahaan dengan jumlah kewajiban (jangka pendek maupun jangka panjang) yang besar cenderung mengungkapkan informasi strategis yang lebih luas, tetapi

dalam penelitian (Mujiyono, 2004) dan (Amalia, 2005) menyatakan rasio *leverage* tidak signifikan mempengaruhi luas pengungkapan sukarela.

Selain *leverage*, profitabilitas juga penting bagi perusahaan. Hal itu karena profitabilitas sering digunakan investor untuk memutuskan membeli atau menjual saham suatu perusahaan dan apakah akan memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi akan membuat manajer mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mendapatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap profitabilitas perusahaan tersebut. Wulandari (2010) menyatakan Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Assets* (ROA) secara signifikan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela, sementara (Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010) menyatakan ROA tidak signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi strategis.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, (2010) yang menguji pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan informasi strategis pada situs web perusahaan-perusahaan di Spanyol. Dalam penelitian tersebut, variabel-variabel *corporate governance* terdiri atas: *Board Activity*, *Board Size*, *Independence of the Board of Directors*, dan *Blockholders (shareholder representatives on boards)*, serta terdapat variabel kontrol yang berupa variabel-variabel keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Board Size* berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan informasi strategis pada internet (situs web), sedangkan *Board activity* dan *Independence of the board of directors* berpengaruh secara negatif

dan signifikan terhadap pengungkapan informasi strategis. Selain itu, Dewan Pemimpin yang juga *Chief Executive Officer* (CEO) perusahaan akan banyak mengungkapkan informasi strategis pada situs webnya.

Beberapa variabel *corporate governance* yang telah digunakan dalam penelitian tersebut, digunakan lagi untuk penelitian ini yaitu jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris, sedangkan untuk variabel *Blockholder* lebih dikhususkan lagi dengan dibagi menjadi dua variabel yaitu kepemilikan manajerial serta kepemilikan institusional. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham terhadap luas pengungkapan informasi strategis perusahaan dari pihak dalam maupun dari pihak luar perusahaan. Variabel kontrol dalam penelitian Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, (2010) beberapa diantaranya dijadikan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Lalu informasi strategisnya dilakukan pengamatan menggunakan laporan tahunan.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena dengan mengkomunikasikan strategi perusahaan dalam laporan tahunan kepada para pemangku kepentingan, dapat memberikan perusahaan kesempatan untuk membedakan dirinya dari perusahaan lain. Selain itu, terdapat perbedaan pada sistem tata kelola perusahaan antara Indonesia dengan Spanyol (negara yang diamati dalam penelitian Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010) yaitu Indonesia menganut *two tier system*, sedangkan Spanyol menganut *one tier system*. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini mengambil

judul “**Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis**”.

1.2 Rumusan Masalah

Pada uraian diatas, banyak terdapat penelitian sebelumnya khususnya di Indonesia terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Faktor - faktor tersebut adalah *corporate governance* yang diproksikan: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris, serta karakteristik perusahaan yang diproksikan: ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis dalam laporan tahunan?
2. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis dalam laporan tahunan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat dirinci tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan informasi strategis dalam laporan tahunan.

2. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan informasi strategis dalam laporan tahunan.
3. Menguji pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap luas pengungkapan informasi strategis dalam laporan tahunan.
4. Menguji pengaruh proporsi komisaris independen terhadap luas pengungkapan informasi strategis dalam laporan tahunan.
5. Menguji pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap luas pengungkapan informasi strategis dalam laporan tahunan.
6. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan informasi strategis dalam laporan tahunan.
7. Menguji pengaruh *leverage* terhadap luas pengungkapan informasi strategis dalam laporan tahunan.
8. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan informasi strategis dalam laporan tahunan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan informasi strategis pada laporan tahunan perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Dapat menambah wawasan dan dijadikan sebagai referensi untuk penelitian penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan wacana tentang pentingnya pengungkapan informasi strategis dalam laporan tahunan, khususnya pada perusahaan manufaktur agar menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab I ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II adalah Telaah Pustaka, yang berisi tentang teori-teori yang melandasi dan berkaitan dengan penelitian ini serta beberapa penelitian terdahulu. Selain itu, dijelaskan juga mengenai kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Bab III menjelaskan Metode Penelitian yang memuat variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian. Bab IV mengenai Hasil dan Analisis yang menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi data berdasarkan alat dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Bab V adalah Penutup yang membahas tentang simpulan dari penelitian ini, keterbatasan, dan saran-saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling, (1976). Esensi dari teori ini manajemen dianalogkan sebagai agen, dan pihak pemilik perusahaan (pemegang saham) sebagai prinsipal. Dalam hubungan antara prinsipal dan agen, prinsipal mengajak agen untuk melayani kepentingan prinsipal dan mendelegasikan wewenang kepada agen dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian sebagai wujud pertanggungjawaban, sebagai agen akan berusaha untuk memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal dalam hal pengungkapan sukarela yang lebih luas. (Mujiyono, 2004).

Pada teori keagenan, asimetri informasi dapat terjadi antara manajer dengan pemilik perusahaan. Hal itu karena, manajer yang berinteraksi langsung pada kegiatan perusahaan sehingga mempunyai informasi yang lengkap tentang perusahaan yang dikelolanya, sedangkan pemilik perusahaan tidak berinteraksi langsung pada kegiatan perusahaan melainkan hanya mengandalkan laporan yang diberikan oleh manajer. Oleh sebab itu, pemilik perusahaan mempunyai informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan manajer.

Berdasarkan perspektif teori keagenan, informasi yang disajikan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan pemilik dan manajer, serta dapat dijadikan oleh pemegang saham dan Stakeholder lainnya untuk mengontrol

aktivitas manajer. (Jensen dan Meckling, 1976). Semakin besar tingkat pengungkapan sukarela (informasi strategis), maka masalah agensi yang ditimbulkan juga akan sedikit.

2.1.2 Teori Efek Pengawasan (*Monitoring Effect Theory*)

Konsep dari teori ini mengungkapkan bahwa *External Directors* (Direksi luar) dianggap sebagai pengawas tertinggi, karena mereka tidak tergantung secara financial pada manajemen perusahaan dan oleh sebab itu tidak peduli dengan kehilangan pekerjaan dan pemotongan bayarannya (Jian dan Chen, n.d). Dalam mendapatkan kesempatan untuk dipekerjakan oleh entitas lain sebagai direktur eksternal, mereka akan termotivasi untuk membangun reputasi mereka sebagai pengawas profesional. Selanjutnya, mereka dapat mempertahankan independensinya ketika berhadapan dengan manajemen (Fama, 1980 dalam Jian dan Chen, n.d), oleh karena itu, pengawasan atas kinerja dan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan juga semakin tinggi sehingga berakibat pada luasnya pengungkapan informasi yang dilakukan manajemen.

Penelitian Ting dan Huang (2009) menguji dua hipotesis, *the alignment and entrenchment hypotheses* terkait dengan *inside directors* (direksi dalam). Hipotesis pertama adalah bahwa *inside directors* membantu memberikan perspektif internal bagi anggota dewan lainnya. Hipotesis ini (disebut sebagai pendorong hipotesis *alignment*) mengasumsikan bahwa *inside directors* membantu dewan membuat penilaian yang lebih baik karena pengetahuan mereka dalam operasi bisnis. Ketika proporsi atau kepemilikan *inside directors* tinggi, hilangnya perusahaan untuk mengurangi kepentingan *inside directors* juga. Jadi,

untuk meningkatkan nilai perusahaan, *inside directors* memiliki dorongan untuk mempertimbangkan maksimalisasi kekayaan pemegang saham dalam pengambilan keputusan. Hipotesis kedua (*Entrenchment Hypothesis*) adalah bahwa dalam rangka konsolidasi posisi mereka, *inside directors* dapat memilih proyek yang tidak menguntungkan bagi pemegang saham. Prediksi itu adalah pihak *inside directors* dengan CEO dan manajer, dan mereka mengurangi efisiensi pemantauan dewan. Jadi, *inside directors* cenderung melawan program berharga bagi para pemegang saham untuk memastikan hak mereka sendiri. Hasilnya mendukung *alignment hypothesis*. Semakin tinggi *inside directors* yang diwakili dewan masih menunjukkan dampak positif pada kinerja perusahaan ketika dewan didominasi oleh *inside directors* atau ketika *inside directors* adalah *blockholders*.

Seorang *inside directors* yang juga menjabat sebagai *president* di perusahaannya menunjukkan *entrenchment effect* karena dengan kekuasaan yang terkonsentrasi. Beberapa karakteristik perusahaan, seperti biaya dan mekanisme *monitoring*, tingkat *leverage*, dan *powerful CEO*, juga dianggap menggambarkan *alignment and the entrenchment effects*. Ketika biaya *monitoring* tinggi atau adanya suatu mekanisme pemantauan dari luar perusahaan, *alignment effect* direksi dalam (*inside directors*) diperkuat. Namun, adanya kemungkinan kelalaian dan adanya kekuatan CEO, *entrenchment effect* dari *inside directors* diwujudkan. Mengingat sinyal informasi dan efisiensi komunikasi dari *inside directors*, *inside directors* diperlukan ketika perusahaan menghadapi biaya *monitoring* tinggi atau ketika perusahaan memiliki mekanisme pemantauan lainnya (Ting dan Huang, 2009).

2.1.3 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal menjelaskan manajemen perusahaan sebagai agen, memiliki dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut disebabkan adanya asimetri informasi atau ketidakseimbangan penguasaan informasi antara agen dengan prinsipal (konflik keagenan). Hal ini disebabkan oleh agen yang memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan. Informasi perusahaan terangkum dalam laporan tahunan perusahaan yang pada umumnya dipublikasikan kepada publik, sehingga laporan tahunan menjadi penting bagi pihak eksternal perusahaan (Andayani, 2002) dalam (Saputri, 2010).

Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Di samping itu, manajemen berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan (Saputri, 2010). Kemudian, pengungkapan informasi tersebut dapat dianggap sebagai sinyal untuk pasar modal, sehingga mengurangi asimetri informasi, mengoptimalkan biaya keuangan (*financing costs*) dan meningkatkan nilai perusahaan (Baiman dan Verrecchia, 1996) dalam (Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010).

2.1.4 Pengungkapan Informasi

Dalam mengungkapkan informasi selain melalui laporan keuangan dapat juga melalui media lain dalam berbagai bentuk, baik yang finansial maupun non

finansial. Informasi yang bersifat finansial dapat mengambil bentuk laporan tahunan, prospektus, laporan analisis dan sejenisnya sedangkan yang bersifat non finansial antara lain jumpa pers tentang produk baru, rencana peningkatan kesejahteraan karyawan, dan sebagainya (Prayogi, 2003). Semakin luas tingkat pengungkapan informasi keuangan suatu perusahaan, maka menunjukkan semakin valid informasi tersebut. (Hadi, 2001).

Menurut Hendriksen, (1992) dalam Mujiyono, (2004) terdapat tiga konsep pengungkapan yang biasanya diusulkan yaitu pengungkapan memadai atau cukup (*adequacy*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Mengungkapkan informasi adalah salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan, karena itu merupakan konsekuensi potensial, serta terdapat keuntungan dan kerugian dari melakukannya. Keuntungannya dapat terkait dengan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan peningkatan *image* perusahaan, peningkatan kepercayaan investor (Babio et al., 2003), likuiditas saham yang lebih besar (Healy et al, 1999;. Guo et al, 2004.) dalam (Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010). Dan kerugian dari pengungkapan informasi yaitu: ancaman pengambilalihan atau *merger*, kemungkinan intervensi oleh lembaga pemerintah dan perpajakan yang berwenang, dan kemungkinan klaim dari karyawan atau serikat pekerja atau dari politik atau kelompok konsumen (Gray et al, 1990) dalam (Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010).

2.1.5 Pengungkapan Informasi Strategis

Pengungkapan informasi strategis perusahaan yang difokuskan dalam penelitian ini, yaitu yang tergolong dalam pengungkapan sukarela pada laporan

tahunan perusahaan. Menurut Meek, et. al (1995) dalam Mujiyono (2004) Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan, memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan tahunan.

Pengungkapan informasi strategis dapat diartikan sebagai keterbukaan dari informasi suatu perusahaan yang memutuskan untuk berbagi dengan para pemangku kepentingan tentang strateginya yang sedang dicapai dan akan dicapai di masa yang akan datang (Santema et. al., 2005). Sedangkan informasi strategis itu sendiri adalah informasi yang paling menonjol dari sifat non keuangan terutama informasi yang tidak terkait dengan laporan keuangan, dimana sekarang perusahaan membocorkannya, karena kaitannya dengan masa depan perusahaan (Lim et al., 2007) dalam (Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010).

2.1.6 *Corporate Governance* dan Pengungkapan Informasi Strategis

Komite Cadbury mendefinisikan *Corporate Governance* (I Nyoman Tjager dalam Mintara, 2008) sebagai :

Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku (Kaihatu, T.S., 2006).

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam praktiknya menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dari manajemen perusahaan. Charkham (1994) dalam (Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010) berpendapat bahwa titik awal untuk pengambilan keputusan strategis harus dibingkai dalam konteks

corporate governance, yang menganalisis proses pemantauan keputusan dan tindakan, serta kemampuan yang mempengaruhi mereka.

Terdapat prediksi yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Semakin tinggi indeks implementasi *Corporate Governance*, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Hal ini sesuai dengan keinginan regulator, dalam hal ini adalah BAPEPAM, yang mendorong diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang akan meningkatkan perlindungan bagi pihak investor dengan adanya informasi yang diberikan oleh perusahaan (Mintara, 2008).

2.1.6.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh dewan komisaris, dewan direksi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial di mana manajer yang bertugas menjalankan perusahaan sekaligus menjadi pemegang sahamnya tentu akan menyelaraskan kepentingannya. Jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer jauh lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham dan opsi saham akan memiliki insentif untuk kontribusi perusahaan. Dengan demikian, struktur modal dengan kepemilikan manajerial tinggi menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan pengungkapan sukarela (Saputri, 2010).

2.1.6.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, seperti: perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Investor institusional yang memiliki proporsi besar dalam kepemilikan saham perusahaan dapat mendesak agar manajer melakukan pengungkapan sukarela dan memaksakan tujuan investasi mereka dengan memberikan usul dan saran pada pihak manajer (Saputri, 2010).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Permanasari, 2010). Pengawasan yang tinggi dari pihak luar terhadap manajemen akan menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas.

2.1.6.3 Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Dewan komisaris mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan serta memberikan nasihat kepada dewan direksi dan juga memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance* sesuai dengan aturan yang berlaku.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat (5) menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris di Indonesia bervariasi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia sendiri jumlah Dewan Komisaris paling banyak tiga dan lima orang (Regar, 2000) dalam (Ratnasari, 2011).

2.1.6.4 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustivandana, 2006) dalam (Ratnasari, 2011).

Komisaris independen diharapkan mampu menempatkan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang mungkin sering terabaikan, misalnya pemegang saham minoritas serta para *stakeholder* lainnya, sebab komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2000) (Linoputri, 2010).

Beberapa kriteria lainnya tentang dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau pemegang saham mayoritas dari perusahaan tercatat yang bersangkutan;
3. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan;
4. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;
5. Komisaris Independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
6. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
7. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Ratnasari, 2011).

2.1.6.5 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses untuk pengambilan keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Dalam rapat tersebut, terdapat banyak suara yang akan diambil menjadi satu keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Proses pengambilan keputusan tersebut, merupakan hal penting dalam

menentukan efektivitas dewan komisaris dalam melakukan mekanisme pengawasan dan pengendalian (Muntoro, 2006).

Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut, akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002) dalam (Ratnasari, 2011).

2.1.7 Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Informasi Strategis

Karakteristik perusahaan yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela (informasi strategis) dapat bervariasi dalam setiap perusahaan. Berdasarkan literature teoritis dan empiris, dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Karakteristik perusahaan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas yang akan diteliti signifikansi pengaruhnya terhadap luas pengungkapan informasi strategis perusahaan.

2.1.7.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan dan struktur kepemilikan yang lebih luas. Ada tiga alternatif proksi yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya ukuran perusahaan, yaitu melalui ukuran aktiva, hasil penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar (Johan, 2006). Perusahaan besar mempunyai entitas yang banyak disorot dalam pasar maupun publik secara umum. Mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan

untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan menghindari resiko (Prayogi, 2003). Tetapi, tidak semua penelitian menunjukkan hubungan ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan sukarela. Penelitian yang tidak berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut seperti Almilia dan Retrinasari (2007), Johan (2006), dan Mintara (2008). Lalu, penelitian yang berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Prayogi (2003), Mujiyono (2004), Amalia (2005), Panjaitan (2009), dan Sofiana (2010).

2.1.7.2 Leverage

Leverage merupakan perbandingan antara utang dengan aktiva. Perusahaan dengan *leverage* tinggi menanggung biaya pengawasan yang tinggi. Jika menyediakan informasi secara lebih komprehensif akan membutuhkan biaya lebih tinggi, maka perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif (Sofiana, 2010). Hasil penelitiannya menunjukkan leverage berpengaruh negatif terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela pada laporan tahunan, hal yang sama juga ditunjukkan pada penelitian (Panjaitan, 2009), sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan, hal itu dikarenakan dengan meningkatnya leverage, permintaan untuk tambahan informasi yang diminta oleh kreditor juga naik, karena mereka akan berusaha untuk mencari tahu seberapa besar kemungkinan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan.

2.1.7.3 Profitabilitas

Shingvi dan Desai (1971) dalam Kartika, A (2009) mengutarakan bahwa *rentabilitas* ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih terinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. *Profitabilitas* yang tinggi menunjukkan tingginya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dengan *profitabilitas* yang tinggi manajer perusahaan akan mengungkap lebih banyak laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja dari perusahaan.

Kartika, A., (2009) menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA tidak signifikan berhubungan dengan luas pengungkapan sukarela, hal ini juga terdapat pada penelitian Sanchez, Dominguez, dan Alvarez (2010). Hal itu tidak sama untuk penelitian Wulandari (2010), dalam penelitiannya ROA berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela laporan keuangan tahunan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengungkapan sukarela (informasi strategis), antara lain seperti diringkas dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel penelitian	Hasil penelitian
Nor Hadi (2001)	Ukuran perusahaan, solvabilitas, basis perusahaan, likuiditas, proporsi kepemilikan saham oleh publik. Luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan	Ukuran perusahaan dan basis perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Solvabilitas, likuiditas, dan kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela
Mujiyono (2004)	<i>Leverage</i> , likuiditas, proporsi kepemilikan saham oleh publik, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan komite audit. Luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.	Hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan yang lainnya tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela
Norita Mohd Nasir dan Shamsul Nahar Abdullah (2005)	Variabel Independen: Status perusahaan, dewan independen, komite audit independen, <i>outside blockholder</i> , kepemilikan manajemen, kepemilikan saham non eksekutif. Variabel Kontrol: <i>Gearing</i> , profitabilitas, dan ukuran perusahaan.	Status perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Dewan independen, <i>outside Blockholder</i> , dan kepemilikan manajemen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Komite audit dan kepemilikan non eksekutif tidak mempunyai pengaruh Sedangkan pada variabel kontrol, hanya ukuran perusahaan yang

	Tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan Malaysia yang mengalami kesulitan keuangan	berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela
Luciana Spica Almia dan Ikka Retrinasari (2007)	Likuiditas, <i>leverage</i> , net profit margin, ukuran perusahaan, status perusahaan Kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan	Terdapat 3 model: Model 1: likuiditas dan status perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan wajib, sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan wajib Model 2: semuanya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela Model 3: likuiditas dan status perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela
Mohammed Hossain dan Helmi Hammami (2009)	<i>Age, size, complexity, assets-in-place</i> , dan <i>profitability</i> Pengungkapan sukarela pada laporan tahunan	<i>Age, size, complexity</i> , dan <i>assets-in-place</i> berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan. <i>Profitability</i> tidak signifikan pada luas pengungkapan sukarela

Andi Kartika (2009)	<p><i>Leverage</i>, likuiditas, profitabilitas (ROA), saham publik, dan umur perusahaan</p> <p>Tingkat pengungkapan laporan keuangan</p>	<p>Profitabilitas dan saham publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan ketiga variabel lainnya tidak berhubungan.</p>
Agy Pramunia Saputri (2010)	<p>Variabel independen: <i>Distressed status</i>, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.</p> <p>Variabel kontrol: <i>Leverage</i>, <i>size</i>, dan profitabilitas</p> <p>Luas pengungkapan sukarela</p>	<p><i>Financial distressed</i>, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit tidak berhubungan dengan luas pengungkapan sukarela.</p>
Sanchez, Dominguez, dan Alvarez (2010)	<p><i>Board Activity</i>, <i>Board Size</i>, <i>Independence of the Board of Directors</i>, dan <i>Blockholders</i>.</p> <p>Variabel Kontrol: <i>Corporate size</i>, <i>industrial sector</i>, <i>profitability</i>, <i>leverage</i>, dan <i>ownership</i></p>	<p><i>Board Size</i> berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan informasi strategis pada internet (situs web), sedangkan <i>Board Activity</i> dan <i>Independence of the board of directors</i> berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi strategis.</p> <p>Dewan pemimpin yang juga CEO perusahaan akan banyak</p>

	<i>diffusion.</i>	mengungkapkan informasi strategis pada situs webnya.
	Pengungkapan informasi strategis pada internet (situs web perusahaan)	<i>Leverage</i> berhubungan secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi strategis pada internet, sedangkan sektor industri, hanya pada industri transportasi yang berhubungan secara signifikan.

Sumber : berbagai jurnal

2.3 Kerangka Pemikiran

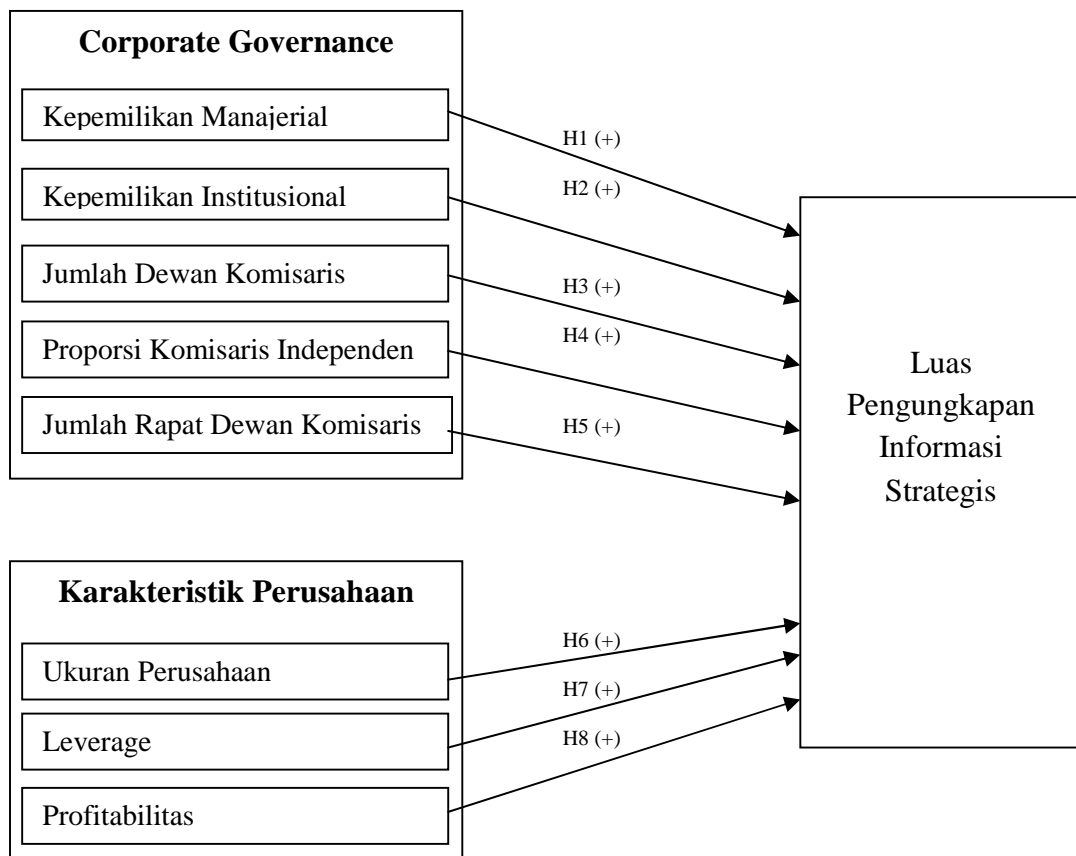
Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan informasi strategis dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). *Corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris, sedangkan untuk karakteristik perusahaan diproksikan dengan ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas.

Semakin baik pelaksanaan *corporate governance* di suatu perusahaan, maka akan semakin luas informasi yang diungkapkan (Khomsiyah, 2003). Selain itu, beberapa karakteristik perusahaan juga dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi khususnya informasi strategis, seperti semakin besarnya perusahaan maka akan lebih luas pengungkapan informasinya dikarenakan lebih banyaknya pihak yang membutuhkan informasi strategis perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan informasi lebih

luas sebagai pertanggungjawaban kepada para krediturnya. Dan semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin luas pengungkapan informasinya karena untuk menarik perhatian para investornya.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis

Tingkat kepemilikan manajer dapat mengurangi biaya agensi karena berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham lainnya (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan adanya kepemilikan manajerial maka tindakan oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi akan berkurang dan manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, sehingga pengungkapan sukarela informasi perusahaan semakin luas.

Teori keagenan memprediksi bahwa terdapat hubungan positif antara kepentingan manajemen dan tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Abdullah (2005) sependapat dengan teori tersebut, yaitu menunjukkan hubungan signifikan dan positif antara kepemilikan manajerial dengan luas pengungkapan sukarela.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh investor institusional yang merupakan pihak luar perusahaan yang bersangkutan. Terkait dengan *monitoring effect theory*, dimana adanya suatu mekanisme

pemantauan dari luar perusahaan, *alignment effect* direksi dalam (*inside directors*) perusahaan diperkuat (Ting dan Huang, 2009) maka dari itu pengawasan kepada pihak manajemen perusahaan semakin besar.

Menurut Shleifer dan Vishny (1997) dalam Saputri (2010) pemilik saham besar dapat melakukan pengawasan karena dapat memperoleh informasi dan mengawasi manajemen serta mempunyai hak suara untuk menekan manajemen. Dengan kepemilikan saham yang besar, investor institusional memiliki insentif yang kuat untuk memantau praktik pengungkapan perusahaan. Dengan demikian, manajer dapat mengungkapkan secara sukarela informasi untuk memenuhi harapan pemegang saham besar. Hal ini sejalan dengan penelitian Rouf dan Al-Harun (2011) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis.

2.4.3 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis

Dewan komisaris merupakan suatu dewan yang bertugas mengawasi kinerja dewan direksi. Coller dan Gregory dalam (Hadi dan Sabeni, 2002) berpendapat bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ting dan Huang

(2009) yang mendukung hipotesis *alignment* yang menunjukkan bahwa semakin tinggi *inside directors* pada dewan menunjukkan dampak positif pada kinerja perusahaan ketika dewan didominasi oleh *inside directors* atau ketika *inside directors* adalah *blockholders*. Oleh karena itu, pengawasan kepada manajemen perusahaan juga akan tinggi maka pengungkapan yang dilakukan pihak manajemen juga akan semakin luas.

Penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara ukuran dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi strategis perusahaan antara lain adalah penelitian yang dilakukan Pearce dan Zahra (1992) dan Dalton et al. (1999) dalam (Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010) menemukan bahwa ukuran Dewan berhubungan positif dengan proses untuk perencanaan strategi baru. Dalam hal ini, semakin tinggi ukuran Dewan semakin tinggi volume informasi strategis yang diungkapkan untuk menunjukkan usaha mereka yang signifikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan:

H3 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis.

2.4.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis

Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan para pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lain (Muntoro, 2006).

Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya. (Ratnasari, 2011).

Semakin besar proporsi komisaris independen maka tingkat pengawasan manajerial akan semakin efektif dan kemudian perusahaan lebih banyak melakukan pengungkapan sukarela (Eng dan Mak, 2003) dalam (Saputri, 2010). Konsep ini sesuai dengan *monitoring effect theory* yang menyatakan bahwa *External Directors* merupakan pengawas tertinggi dan akan mempertahankan independensinya ketika berhadapan dengan manajemen, sehingga semakin tingginya pengawasan terhadap pihak manajemen (Jian dan Chen, n.d). Pada penelitian yang dilakukan (Arifin et al, 2001 dalam Mujiyono, 2004) menunjukkan bahwa komisaris independen secara statistik berhubungan dengan tingkat pengungkapan sukarela.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis.

2.4.5 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis

Dalam rangka menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan,

mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi, dan mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002) dalam (Ratnasari, 2011).

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Keberadaan dewan komisaris ditugaskan untuk memastikan bahwa direktur dan manajemen perusahaan bekerja dengan baik guna kepentingan pemegang saham (Fama, 1980 dalam Prasetyo, 2009). Oleh karena itu, semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka kinerja dewan komisaris dalam hal pengawasan akan semakin baik. Dengan begitu, pengungkapan informasi strategis perusahaan juga akan semakin luas. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Xie et al. (2003) dalam Waryanto (2010) yang menemukan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan semakin efektif sehingga pengungkapan yang dilakukan perusahaan akan semakin luas.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5 : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis.

2.4.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis

Dalam teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar. Jadi untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas (Waryanto, 2010).

Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan lain. Mengungkapkan terlalu banyak tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar Singhvi dan Desai; Buzby dalam (Rini, 2010). Asumsi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prayogi (2003), Mujiyono (2004), dan Amalia (2005) yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin luas pengungkapan informasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H6 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis.

2.4.7 Pengaruh *Leverage* terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini dikarenakan, jika *leverage* tinggi mengandung biaya pengawasan yang tinggi juga, sehingga perusahaan akan menyediakan informasi yang lebih banyak (komprehensif).

Menurut Schipper (1981) dalam Almilia dan Retrinasari (2007), tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan

informasi kreditur jangka panjang, Sehingga perusahaan akan menyediakan informasi secara lebih luas.

Penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara *leverage* dengan tingkat pengungkapan informasi strategis perusahaan antara lain adalah penelitian yang dilakukan Sanchez, Dominguez, dan Alvarez (2010).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketujuh sebagai berikut:

H7 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis.

2.4.8 Pengaruh Profitabilitas terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan tingginya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dengan profitabilitas yang tinggi manajer perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja dari perusahaan (Kartika, A., 2009). Hal ini sependapat dengan Saputri (2010) yang menyatakan bahwa Perusahaan yang memiliki *good news* dapat ditandai dengan perolehan laba tinggi maupun profitabilitas tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi tambahan yang bersifat *nonmandatory* guna menunjukkan kinerja perusahaan yang baik

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2010) menemukan profitabilitas (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Informasi ini mendukung hipotesis teori sinyal, yang menyatakan bahwa

perusahaan dengan informasi perusahaan yang bagus (*good news*) lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi tambahan (Ross, 1979) dalam (Saputri, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedelapan sebagai berikut:

H8 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi strategis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Luas pengungkapan informasi strategis. Informasi strategis adalah informasi yang paling menonjol dari sifat non keuangan terutama informasi yang tidak terkait dengan laporan keuangan, dimana sekarang perusahaan membocorkannya, karena kaitannya dengan masa depan perusahaan (Lim et al., 2007) dalam (Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010). Pengukuran variabel ini dengan mengukur jumlah item dari indeks pengungkapan informasi strategis yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Indeks pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada indeks yang digunakan oleh Sanchez, Dominguez, dan Alvarez (2010). Item-item dari indeks pengungkapan tersebut terdiri dari:

1. Tujuan, misi, dan filosofi perusahaan
2. Aliansi strategis
3. Posisi strategi perusahaan di sektor industrinya (pertama dan kedua)
4. Rencana strategi perusahaan (proyek ekspansi pada pasar, produk, dan region lain)
5. Rencana tahunan perusahaan
6. Deskripsi dalam konteks persaingan
7. Informasi resiko (keuangan, komersial, teknis)

8. Informasi tentang proses produksi

Dalam pengukuran pengungkapan informasi strategis tersebut, dapat dilakukan menghitung indeks pengungkapannya dengan cara memberikan skor untuk setiap item yang diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan secara dikotomi, di mana jika suatu item diungkapkan, maka akan diberikan nilai satu (1) dan jika tidak diungkapkan akan diberikan nilai nol (0). Sehingga didapatkan rumus:

$$\text{Info_Strategis} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan}}$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah *corporate governance* yang diproksikan dalam kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris. Selain itu, juga menggunakan karakteristik perusahaan yang diproksikan dalam ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas.

3.1.2.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana pihak manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh dewan direksi dan komisaris (manajerial) yang diungkapkan dalam laporan tahunan (Saputri, 2010).

3.1.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional menunjukkan persentase saham yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan

kepemilikan oleh institusi keuangan lain. Kepemilikan institusional diukur sesuai persentase kepemilikan saham oleh institusi keuangan dalam perusahaan (Haruman, 2008).

3.1.2.3 Jumlah Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan dewan pengawas yang bertugas mengawasi kinerja dewan direksi pada perusahaan. Jumlah dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah total dewan komisaris yang dimiliki perusahaan, yang terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris.

3.1.2.4 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari di suatu perusahaan (bukan manajer atau karyawan). Proporsi Komisaris Independen diukur berdasarkan persentase (%) antara jumlah anggota Komisaris Independen dibandingkan dengan jumlah total anggota Dewan Komisaris.

3.1.2.5 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris merupakan pertemuan antara anggota dewan komisaris yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi untuk menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut, akan dibahas tentang strategi perusahaan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil oleh manajemen (FCGI, 2002 dalam Ratnasari, 2011). Jumlah rapat dewan komisaris diukur berdasarkan total rapat yang dilaksanakan secara intern antar dewan komisaris perusahaan pada tiap tahunnya.

3.1.2.6 Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ada banyak cara yang dilakukan untuk mengukur perusahaan, seperti dengan melihat banyaknya jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan, ukuran aktiva, hasil penjualan bersihnya, dan ada beberapa cara lagi lainnya. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan sampai akhir periode. Total aset tersebut akan ditransformasikan dalam logaritma natural untuk menghindari fluktuasi data yang berlebihan.

3.1.2.7 Leverage

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai asset perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi krediturnya (Suripto, 1999) dalam (Saputri, 2010). Rasio ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

3.1.2.8 Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Untuk menghitung profitabilitas perusahaan, penelitian ini menggunakan ROA (*return on total asset*) dengan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Lebih terperinci skala pengukuran dan indikator masing-masing variabel adalah seperti tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Indikator dan Skala Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Dependen Indeks pengungkapan informasi strategis	Jumlah item yang diungkapkan perusahaan / Jumlah item yang diharapkan	Rasio
Variabel Independen: Kepemilikan manajerial	Jumlah persentase kepemilikan dewan direksi dan komisaris (manajerial) perusahaan	Rasio
Kepemilikan institusional	Jumlah persentase kepemilikan institusi keuangan perusahaan	Rasio
Jumlah dewan komisaris	Jumlah dewan komisaris	Nominal
Proporsi komisaris independen	Jumlah anggota dewan komisaris independen / Total dewan komisaris	Rasio
Jumlah rapat dewan komisaris	Jumlah rapat intern dewan komisaris selama satu tahun	Nominal
Ukuran perusahaan	Ln Total Aset	Rasio
<i>Leverage</i>	Total Hutang / Total Aset	Rasio
Profitabilitas (ROA)	Laba Bersih / Total Aset	Rasio

Sumber : dikembangkan untuk penelitian

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI tahun 2009 dan 2010. Jumlah populasi sebanyak 153 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *judgement sampling*, yaitu salah satu bentuk *purposive sampling* dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang secara berturut-turut menyediakan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 dan 2010.
2. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan dalam bentuk bahasa Indonesia atau dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan selain bahasa Indonesia serta menggunakan satuan rupiah.
3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan kriteria di atas, maka didapatkan sampel yang dipakai dalam penelitian ini sebanyak 64 perusahaan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada (www.idx.co.id), dan data base pasar modal pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP Semarang.

Periode data yang digunakan adalah tahun 2009 dan 2010, diharapkan pada tahun tersebut perusahaan sudah mengungkapkan banyak informasi strategisnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan periode 2009 dan 2010 yang disediakan oleh Pojok BEI dan www.idx.co.id, serta data yang tersedia di *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Dengan begitu, maka akan mendapatkan data tentang informasi strategis apa sajakah yang diungkapkan oleh perusahaan manufaktur.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006). Dengan metode ini maka akan mempermudah pemahaman terhadap variabel-variabel yang digunakan.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis persamaan regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Almilia dan Retrinasari, 2007). Hasil pengujian analisis ini akan memberikan dasar bagi penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian. Kesimpulan mengenai hipotesis setiap variabel independen ditentukan oleh tanda positif/negatif dan signifikansi koefisien regresi variabel-variabel yang bersangkutan. Persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Info_Strategis} = & S_0 + S_1\text{Man_Own} + S_2\text{Ins_Own} + S_3\text{ComSize} + \\ & S_4\text{Indep_Com} + S_5\text{Com_Meet} + S_6\text{FirmSize} + \\ & S_7\text{Lev} + S_8\text{Profit} + e \end{aligned}$$

Keterangan:

Info_Strategis	= Jumlah pengungkapan informasi strategis
Man_Own (Kepemilikan manajerial)	= Jumlah persentase kepemilikan dewan direksi dan komisaris (manajerial) perusahaan
Ins_Own (Kepemilikan institusional)	= Jumlah persentase kepemilikan institusi keuangan perusahaan
ComSize (Jumlah dewan komisaris)	= Jumlah dewan komisaris

Indep_Comp (Proporsi komisaris independen)	= Rasio jumlah anggota komisaris independen terhadap seluruh anggota komisaris
Com_Meet (Rapat dewan komisaris)	= Jumlah rapat intern dewan komisaris selama satu tahun
FirmSize (Ukuran perusahaan)	= Ukuran perusahaan (jumlah aset)
Lev (<i>Leverage</i>)	= Rasio total hutang terhadap total aset
Profit (Profitabilitas)	= Rasio laba bersih terhadap total aset
β_0	= Konstanta
β_1, \dots, β_8	= Koefisien masing-masing variabel independen
e	= Error

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Agar model analisis regresi dapat dipakai dalam penelitian ini, maka akan dilakukan pengujian asumsi klasik regresi yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas terlebih dahulu.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Dalam uji normalitas ini ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006). Analisis grafik dapat dilakukan dengan memperhatikan

penyebaran data (titik) pada Normal *P-Plot of Regression Standardized Residual* dari variable independen, dimana :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Sedangkan uji statistik, dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorof-Smirnov*. Jika nilai *Kolmogorof-Smirnov* tidak signifikan (variabel memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05), maka semua data terdistribusi secara normal.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2006). Pada uji ini, dapat dilakukan dengan melihat besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Dalam penelitian ini, menggunakan kriteria pengujian (Mujiyono, 2004):

Apabila nilai $Tolerance < 1$ atau nilai $VIP < 10$, berarti tidak ada multikolinearitas.

Apabila nilai $Tolerance > 1$ atau nilai $VIP > 10$, berarti terdapat multikolinearitas.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Penelitian ini menggunakan analisis grafik dan analisis

statistik. Untuk analisis grafik, menggunakan grafik scatterplot, dengan dasar analisisnya :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sedangkan uji statistik yang digunakan adalah uji glejser. Uji ini mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dasar analisisnya yaitu jika nilai probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3.5.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. (Ghozali, 2006).

Dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat digunakan alat analisis Durbin-Watson. Skala pengujian autokorelasi berdasar pada nilai tabel

Durbin-Watson, sehingga diketahui nilai d_l dan d_u dengan mencari berdasarkan banyak variabel independen (k) dan banyak sampel (n).

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi tingkat 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah:

- a. Jika signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/Independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Jika signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sedangkan semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin kecil juga (sangat terbatas) (Ghozali, 2006).

3.5.5 Uji Beda T-Test

Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 2006).

Tujuan penggunaan uji ini adalah untuk menguji perbedaan Pengungkapan informasi strategis antara Panelis 1 dan Panelis 2. Disini yang berperan sebagai Panelis 2 yaitu Ala' Rahmawati alumni jurusan Akuntansi 2010 Reg II Fakultas Ekonomika dan Bisnis tahun 2012. Dilakukan uji ini untuk menghindari manipulasi dan subyektifitas data. Sehingga peran panelis 2 sebagai reviewer untuk menganalisis pengungkapan informasi strategis dengan penggunaan indeks yang sama dengan Panelis 1 serta menggunakan laporan tahunan perusahaan

manufaktur 2009-2010 yang sama juga dengan Panelis 1, dengan total sampel perusahaan 128 perusahaan.